

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab kedua ini akan dipaparkan mengenai objek penelitian yang akan penulis teliti, yaitu mengenai Kabupaten Brebes baik dalam visi dan misi, kondisi geografis, dan kondisi kependudukan/demografis. Kemudian gambaran umum dan peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) studi kasus Stigma gelandangan dan pengemis Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes.

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Brebes

2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Brebes

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan yang dilimpahkan dari Gubernur, telah ditetapkan Visi Kabupaten Brebes untuk diangkat dalam RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022.

Visi yang ditetapkan tersebut merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategi sesuai kondisi obyektif dalam lima tahun kedepan, yaitu “Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Kabupaten Brebes menjalankan misi-misi berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan.

2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal.
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional, efektif, dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri.
6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak dalam partisipasi pembangunan dan mewujudkan perlindungan sosial.

2.1.2 Letak Geografis

Kabupaten Brebes termasuk daerah yang memiliki wilayah terluas di Jawa Tengah, menempati urutan ke lima setelah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Blora. Luasnya wilayahnya mencapai 1.662,96 km² atau 5,10 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah dengan garis pantai sepanjang 55 km dan luas wilayah laut 12 mil dari darat mencapai 1036,80 km².

Letak geografis Kabupaten Brebes terletak diantara $6^{\circ}44'56,5''$ - $7^{\circ}20'51,48''$ Lintang Selatan dan $108^{\circ}41'37,7$ - $109^{\circ} 11'28,92''$ Bujur Timur, membentang dari utara ke selatan sepanjang 87 km dan dari barat ke timur sepanjang 50 km. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Kota dan Kabupaten Tegal, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Cilacap, sedangkan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, terdapat 22 sungai yang melintas di wilayah kabupaten Brebes.

Secara administratif, Kabupaten Brebes terdiri dari 17 kecamatan, 292 desa, 5 keluraha, 1.573 RW dan 8.153 RT. Dari 17 kecamatan tersebut, Kecamatan Bantarkawung adalah kecamatan terluas yaitu dengan luas wilayah sebesar 205 km^2 , sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah kecamatan Kersana $25,23 \text{ km}^2$. Selain itu, Kecamatan Brebes sebagai ibukota kabupaten memiliki luas wilayah sebesar $80,96 \text{ km}^2$. Karena kondisi geografisnya setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Brebes memiliki ketinggian permukaan tanah (elevasi) yang berbeda-beda. Kecamatan dengan posisi paling tinggi di wilayah Brebes adalah Kecamatan Sirampog (875mdpl), sedangkan kecamatan dengan posisi paling rendah adalah Kecamatan Wanasari (1 mdpl) dan Kecamatan Brebes berada di ketinggian 3mdpl.

2.1.3 Kondisi Penduduk (Demografis) Kabupaten Brebes

Jumlah penduduk Kabupaten Brebes secara umum mengalami pertambahan di setiap tahunnya. Dalam rentang waktu lima tahun dari tahun 2010-2015, jumlah penduduk terbesar berada di tahun 2015 yaitu sebanyak

1.880.057 jiwa, yang terdiri dari 954.594 laki-laki dan 925.463 perempuan, lihat *Tabel 2.1*.

Kabupaten Brebes merupakan pintu gerbang utama, pintu masuk Jawa Tengah jika kita masuk dari Provinsi Jawa Barat¹. Brebes merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak di Jawa Tengah. Kabupaten Brebes, sebuah titik peta yang menengarai adanya kawasan produktif dan strategis di jalur pantura.

Sementara untuk rata-rata kepadatan penduduk, Kabupaten Brebes cukup tinggi yaitu sekitar 1.076 jiwa/km². Kemudian untuk kecamatan di Kabupaten Brebes yang menempati kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Jatibarang dengan jumlah 2.443 jiwa/km² dan yang terendah adalah Kecamatan Salem dengan jumlah 393 jiwa/km².

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes
Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin	Luas Daerah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
		Laki-Laki	Pere-Mpuan	Jumlah			
1.	Salem	28.305	27.237	55.542	103,92	15.209	365
2.	Bantarkawung	46.884	45.156	92.040	103,83	20.500	449
3.	Bumiayu	53.294	51.463	104.757	103,56	7.369	1.442
4.	Paguyangan	52.673	50.263	102.936	104,79	10.494	946
5.	Sirampog	32.425	30.994	63.419	104,62	6.703	946

¹Bappeda Kabupaten Brebes (Brebes dalam angka 2014)

6.	Tonjong	34.967	34.617	69.584	101,2	8.126	856
7.	Larangan	80.987	78.799	159.786	102,78	16.468	970
8.	Ketanggungan	71.045	68.103	139.145	104,32	14.907	933
9.	Banjarharjo	59.049	58.408	117.457	101,10	14.026	837
10.	Losari	68.778	65.995	134.773	104,22	8.943	1.507
11.	Tanjung	45.547	44.322	89.869	102,76	6.774	1.327
12.	Kersana	30.134	30.124	60.438	100,63	2.523	2.395
13.	Bulakamba	103.424	98.255	201.679	105,26	10.293	1.959
14.	Wanasari	75.511	72.578	148.089	104,04	7.444	1.989
15.	Songgom	47.856	47.324	95.180	101,12	4.903	1.941
16.	Jatibarang	39.203	38.884	78.047	100,92	3.518	2.219
17.	Brebes	84.332	82.981	167.313	101,63	8.096	2.067
Jumlah		954.594	925.463	1.880.057	103,15	1.662.296	1.131

Sumber : BPS Kab. Brebes Tahun 2015

2.1.4 Instansi Pemerintah Kabupaten Brebes

Dalam pelaksanaannya administrasi Pemerintahan Kabupaten Brebes dilaksanakan oleh 121 organisasi daerah dan instansi vertikal, yang terbagi atas 110 organisasi daerah seperti Dinas, Badan, Kantor, Inspektorat, Kecamatan, dan lain-lain serta 11 instansi vertikal seperti BPS, BPN, Kantor Kementrian Agama, Pengadilan Negeri, dan lain-lain. Dari hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa dari skala 100, rata-rata IKM masyarakat berada di angka 77,6 hal ini menunjukkan kinerja

pelayanan SKPD di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes dikatakan cukup baik, sedangkan capaian IKM tertinggi adalah Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Brebes yaitu dengan nilai 90,52.

2.1.5 Kondisi Sosial

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pembangunan kesejahteraan sosial yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, dan negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Sementara itu, definisi kesejahteraan sosial sendiri adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pembangunan bidang sosial senantiasa berhadapan dengan berbagai kendala dan tantangan yang semakin luas dan kompleks. Sangat disadari sejalan dengan perkembangan sosial saat ini maka semakin berpengaruh terhadap kondisi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di masyarakat.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes jumlah penduduk rawan sosial pada tahun 2014 mayoritas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, meskipun tidak signifikan. Kemudian dilihat dari sisi kesejahterannya berdasarkan data kemiskinan mikro, yang diperoleh dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) bersumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang memuat jumlah rumah tangga dan individu miskin dan rentan miskin dengan

kondisi kesejahteraan sampai dengan 40% terendah, di Kabupaten Brebes ada sebanyak 263.979 rumah tangga yang terinci dari 1.032.521 jiwa, dengan sebaran tertinggi di Kecamatan Wanasari dengan 23.190 rumah tangga (98.059 jiwa) dan terendah di Kecamatan Sirampog dengan 8.023 rumah tangga (32.028 jiwa). Rumah tangga atau individu miskin dan rentan miskin tersebut merupakan sasaran program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes, agar dapat lebih meningkat kesejahteraannya.²

Kondisi sosial juga mencakup bidang pendidikan dan kesehatan. Apabila tingkat pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Brebes memadai, maka akan terciptanya kondisi sosial yang ideal. Menurut Linton (2000) dalam Basrowi Juariyah (2010) mengatakan kondisi sosial masyarakat mempunyai lima indikator yaitu : umur dan jenis kelamin, pekerjaan, prestise, *family* atau kelompok rumah tangga, dan keanggotaan dalam perserikatan. Dari kelima indikator tersebut, hanya indikator umur dan jenis kelamin yang tidak terpengaruh oleh proses pendidikan, sehingga hanya empat indikator yang perlu diukur tingkat perbaikannya, guna mengetahui tingginya manfaat sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu pendidikan dan kesehatan saat ini menjadi sorotan penting bagi Pemerintah Kabupaten Brebes untuk menunjang pembangunan sosial.

2.1.5.1 Pendidikan

Suatu Negara dapat berkembang pesat tidak cukup didukung dengan memiliki kekayaan alam yang melimpah. Akan tetapi kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola kekayaan alam disuatu negara sangat berpengaruh.

² RPJMD Kabupaten Brebes, 2017-2022

Dengan begitu perlu adanya peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan baik itu formal, informal maupun informal, yang mana secara tidak langsung dapat mengisi pembangunan Negara.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh manusia dalam upaya membentuk manusia yang berkualitas sehingga mampu memajukan dan mengembangkan suatu negara. Dari definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa pendidikan dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia sehingga mampu memberikan sumbangan-sumbangan terhadap kemajuan negara.

Dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), dinyatakan bahwa ada tiga tantangan besar dalam bidang pendidikan di Indonesia, yaitu (1) mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai, (2) mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global, (3) sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman, memerhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, maka akan semakin produktif sehingga akan menghasilkan pendapatan yang tinggi. Semakin banyak masyarakat dalam suatu negara memiliki pendapatan yang tinggi maka akan

semakin sejahtera. Sehingga tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat akan membantu dalam proses pembangunan suatu negara.

Menurut Mudyoharjo (Mahmud, 2012:1) peranan pendidikan dalam pembangunan adalah:

1. Mengembangkan teknologi baru.

Hasil pendidikan adalah orang terdidik yang mempunyai kemampuan melaksanakan penelitian dan pengembangan yang dapat menghasilkan teknologi baru.

2. Menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi.

Orang-orang terdidik hasil pendidikan juga masuk dan aktif bekerja di bidang konstruksi yang menghasilkan rancang bangun berbagai macam pabrik dan perusahaan. Dari pabrik dan perusahaan tersebut akan menghasilkan berbagai kebutuhan barang dan jasa.

3. Menjadi tenaga produktif yang menghasilkan barang dan jasa.

Orang-orang terdidik hasil pendidikan dapat menjadi tenaga kerja produktif yang memproses produksi barang-barang kebutuhan hidup dan jasa, sehingga menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat.

4. Pelaku generasi dan pencipta budaya

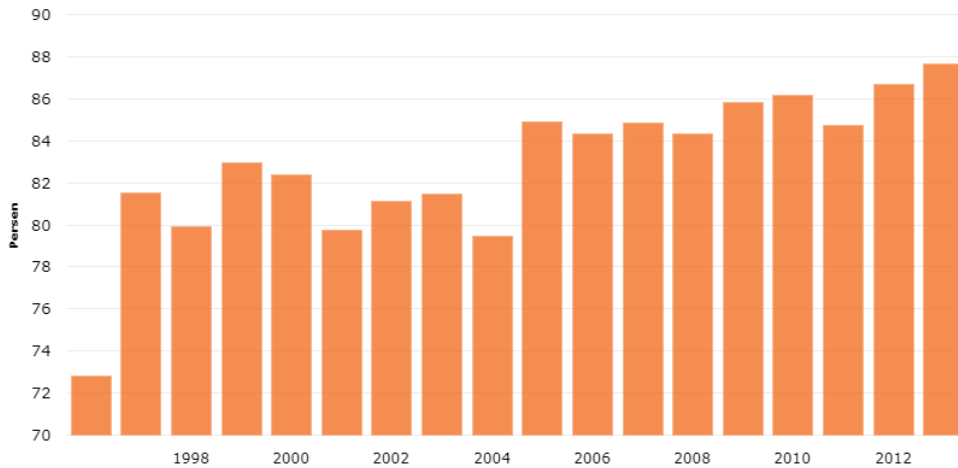
Orang-orang terdidik hasil pendidikan tidak hanya merevisi kebudayaan masa lampau tetapi juga sekaligus melakukan perbaikan-perbaikan dan penciptaan unsur-unsur budaya baru berdasarkan kebudayaan lama yang telah dimilikinya.

5. Konsumen barang dan jasa.

Orang-orang terdidik hasil pendidikan merupakan orang-orang yang mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan karena mereka membutuhkan barang dan jasa tersebut dan arena mereka adalah orang-orang yang terdidik. Mereka bisa lebih selektif dalam memilih barang-barang dan jasa yang lebih baik dari pada orang-orang yang tidak terdidik.

Diatas merupakan harapan bagi setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Brebes. Di era globalisasi saat ini dimana sebagian daerah di Jawa Tengah lain sudah semakin mudah mendapatkan informasi melalui teknologi, namun bagi Kabupaten Brebes masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Brebes terkait masalah literasi. Menurut Kepala Bidang Pendidikan Non-Formal-Perguruan Tinggi (PNF-PT) Disdik Jateng Jasman Indradno dalam Republika (2014), Kabupaten Brebes merupakan daerah dengan tingkat buta aksara tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu faktor penyebabnya adalah Kabupaten Brebes memiliki jumlah penduduk terpadat di Jawa Tengah, yaitu sebanyak 1.880.057 jiwa. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 8,51% orang di Kabupaten Brebes yang menyanggah masalah buta aksara pada tahun 2014. Penyandang buta aksara tersebut berada dalam rentang usia 15 sampai 59 tahun, dan sebagian besarnya adalah masyarakat berusia lanjut yang semasa kecilnya tidak sempat mengenyam pendidikan sekolah. Data tersebut merupakan hasil dari verifikasi tingkat buta aksara di Jawa Tengah pada tahun 2012.

Gambar 2.1
Angka Melek Huruf Usia >15 tahun
di Kabupaten Brebes



Sumber: DATABOKS.CO.ID

Menurut data Susenas 2015, untuk rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Brebes yakni 5,88. Ini artinya penduduk di Kabupaten Brebes rata-rata memiliki pendidikan setara kelas 6 SD/MI. Kepala Bidang Pemerintah Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Brebes Khaerul Abidin (Radar Tegal 2015) menyampaikan bahwa kondisi semacam ini tentu saja perlu mendapat perhatian serius dalam rangka penuntasan wajib belajar 12 tahun. Berdasarkan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Brebes tersebut masih dibawah angka nasional yakni 9,2.

Pada Jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) prasarana telah disediakan pada semua desa/kelurahan. Kabupaten Brebes yang terbagi menjadi 17 kecamatan dan 292 desa/kelurahan padatahun 2016 memiliki Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 1.103 buah. Sedangkan untuk pendidikan

jenjang menengah pertama sebanyak 243 buah dan jenjang menengah atas sebanyak 151 buah³.

Dilihat dari rasio jumlah murid dengan guru didapat gambaran bahwa seorang guru di Kabupaten Brebes rata-rata mengajar 32 murid. Rasio antara murid dengan kelas dan guru yang tidak seimbang dapat menimbulkan dampak buruk terhadap daya serap belajar yang akhirnya memengaruhi prestasi pendidikan dan proses pembangunan Kabupaten Brebes.

2.1.5.2 Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat dapat dinilai dari ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan yang tersedia, akses masyarakat dalam menikmati semua fasilitas kesehatan yang tersedia, akses masyarakat dalam menikmati semua fasilitas kesehatan di suatu daerah serta sistem pelayanan kesehatan yang baik.

Hal ini akan terwujud bila adanya dukungan pemerintah dan swasta sekaligus . pada tahun 2017 jumlah rumah sakit umum ada 11 unit terdiri dari rumah sakit umum negeri 2 buah, rumah sakit swasta 9 buah. Didukung pula oleh tersedianya puskesmas induk sebanyak 38 unit dan 244 polindes. Selain itu keberadaan tenaga kesehatan yang memadai. Jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2017 sebanyak 226 orang tenaga medis, 1.323 tenaga perawat dan 1.276 tenaga kebidanan.

³ <https://brebeskab.bps.go.id>

2.1.5.3 Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penanganan PMKS tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Dalam kaitan ini panti sosial milik pemerintah memiliki peran strategis sebagai ujung tombak yang bersentuhan dalam penanganan PMKS melalui sistem kelembagaan serta mendorong munculnya produk-produk operasional pelayanan kesejahteraan sosial. Menurut data dari RPJMD Kabupaten Brebes (2017-2022), penanganan PMKS di Kabupaten Brebes dalam kurun waktu tahun 2012-2016 mengalami penurunan dibandingkan jumlah pada tahun sebelumnya. Jumlah anak balita terlantar pada semester 1 (satu) tahun 2016 sebanyak 109 balita menurun 25,85% dibanding tahun 2015. Untuk jumlah anak terlantar tahun 2016 juga mengalami penurunan sebesar 0,75%.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Sosial dan Penanganan PMKS Brebes Tahun 2012-2016

No.	Penduduk Penyandang Masalah Sosial dan Jumlah PMKS (jiwa/orang)	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Penduduk rawan sosial dan sarana					
	1) Anak jalanan	-	72	109	59	87
	2) Penderita sakit jiwa	-	649	649	616	596
	3) Gepeng	511	497	294	221	227
	4) Jumlah penderita HIV/AIDS	-	1	9	9	12
	5) Jumlah pecandu narkoba	-	23	19	55	23
	6) Sarana rehabilitasi sosial	-	-	-	1	1
	7) Fakir miskin	303.031	247.080	243.448	114.133	91.702
	8) Bayi terlantar	518	452	448	147	109
	9) Anak terlantar	1.453	1.010	808	264	262
	10) Lanjut usia terlantar	5.612	4.090	3.652	1.271	1.188

	11) Komunitas adat terpencil	-	758	791	791	818
	12) Penyandang cacat	11.584	8.797	5.540	4.274	3.569
	13) Penyandang tunanetra	-	1.469	1.448	412	241
	14) Penyandang tuna rungu	-	428	418	299	291
	15) Penyandang tuna wicara	-	943	925	600	462
	16) Penyandang tuna wicara rungu	-	1.371	1.344	1.053	903
	17) Penyandang tuna daksa	-	2.726	-	908	632
	18) Penyandang tuna grahita	-	767	311	136	129
	19) Penyandang cacat jiwa	-	649	661	616	544
	20) Penyandang cacat ganda					
	21) Pengungsi dan korban bencana	-	62	-	59	59
	22) Tuna susila	-	114	42	19	29
	23) Bekas narapidana	-	494	-	228	216
	24) Pengidap HIV/AIDS	1	1	9	9	12
	25) Korban penyalahgunaan NAPZA	-	23	22	20	23
	Jumlah Panti Asuhan					
2.	1) Panti Asuhan Anak	-	10	11	11	11
	2) Panti Tresna Wreda	1	1	1	1	1
	3) Panti Rehabilitasi	-	1	1	1	1
	4) Pusat Rehabilitasi Narkoba	-	-	-	2	2
	5) Rumah Singgah	-	-	-	1	1
	Jumlah PMKS					
3.	1) PMKS tertangani	-	31.527	143.899	99.554	56.491
	2) PMKS yang seharusnya menerima bantuan	-	264.481	261.208	118.407	98.836
	3) PMKS yang diberikan bantuan	-	31.527	143.899	99.544	56.491

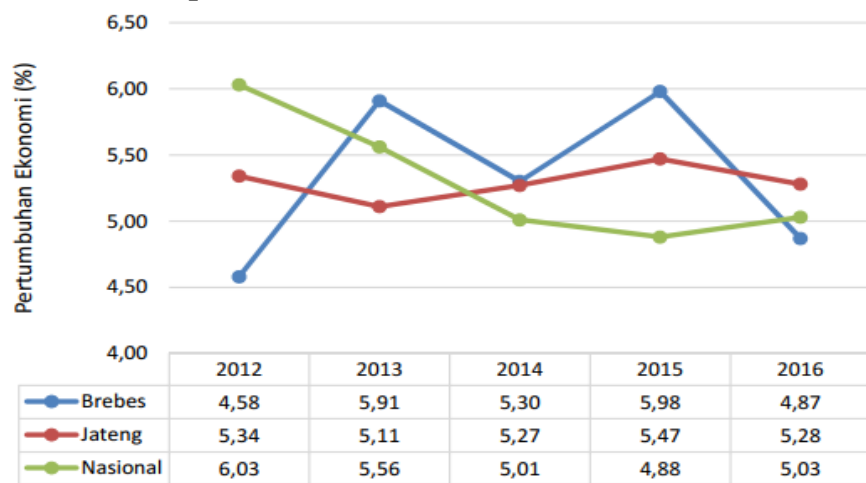
Sumber: Dinsosnakertrans dan BNK Kabupaten Brebes

2.1.6 Kondisi Ekonomi

Berdasarkan data dari RPJMD Kabupaten Brebes 2017-2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes selama kurun waktu tahun 2012-2016 cenderung berfluktuatif, pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes sebesar 4,58%, meningkat menjadi 5,91% pada tahun 2013, mengalami

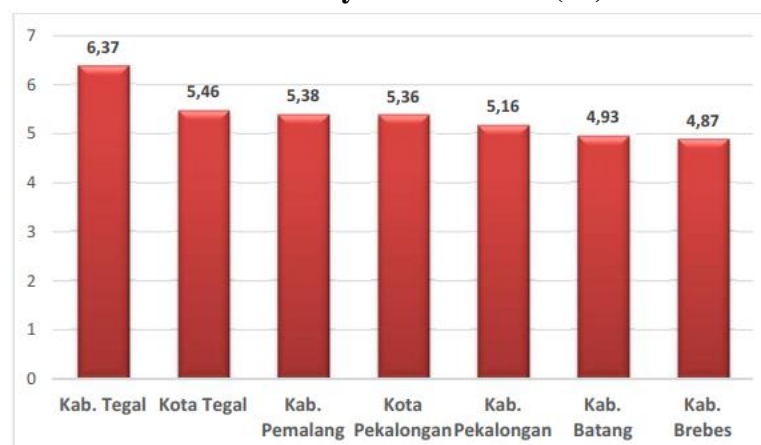
perlambatan pada tahun 2014 menjadi 5,30%, meningkat lagi menjadi 5,98% pada tahun 2015, dan mengalami perlambatan pada tahun 2016 menjadi 4,87%. Kondisi ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global, nasional, dan regional yang ada dalam kondisi ketidakpastian ekonomi.

Gambar 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Gambar 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Brebes dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2016 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik (RPJMD Kab. Brebes), 2017

Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota lainnya se-eks Karesidenan Pekalongan pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Brebes menempati posisi terendah (4,87%). Kabupaten Batang (4,93%), Kabupaten Pekalongan (5,16%), Kota Pekalongan (5,36%), Kabupaten Pemasang (5,38%), Kota Tegal (5,46%) dan Kabupaten Tegal (6,37%).

2.2 Profil Dinas Sosial Kabupaten Brebes

2.2.1 Sejarah Singkat Terbentuknya Dinas Sosial Kabupaten Brebes

Pada tahun 1981 terbentuk Kantor Direktorat Jenderal Transmigrasi (Kanditjentrans) Kabupaten Brebes yang kemudian pada tahun 1985 berubah nama menjadi Kantor Departemen Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan (Kandep Trans dan PPH) Kabupaten Brebes dengan Kepala Kantor Bapak J.R. Djokomoeljono.

Pada tahun 2001 dengan adanya Otonomi Daerah, Kantor Departemen Transmigrasi dan Permukiman Perambahan Hutan Kabupaten Brebes bersama dengan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Brebes dan Asisten III Sekda Kabupaten Brebes Bidang Kependudukan melebur menjadi Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes dengan Kepala Dinas Ibu Ir. Budi Rahayu.

Perubahan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) baru pada tahun 2009 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes terpecah menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Brebes dengan Kepala Dinas Bapak G. Rohastono Ajie yang sebelumnya Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Brebes.

2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Brebes dengan Kepala Dinas Bapak Drs. H. Tarsun, MM. yang sebelumnya Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disdukpilhakertrans) Kabupaten Brebes.

Pada tahun 2001 Bapak Drs. H. Tarsun, MM. memasuki masa pensiun dan digantikan oleh Bapak Ir. Amin Budi Raharjo, M.Pi. Kemudian pada tahun 2013 Bapak Ir. Amin Budi Raharjo dimutasikan menjadi Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (DINPARBUDPORA) Kabupaten Brebes lalu digantikan oleh Bapak H. Syamsul Komar Kaedy, S.Sos..

Pada tanggal 4 Januari 2017 berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Brebes terpecah menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Brebes dengan Kepala Dinas Bapak Drs. Zaenudin, M.Si.
2. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Brebes dengan Kepala Dinas Bapak H. Syamsul Komar Kaedy, S.Sos. sampai sekarang.

Demikian sejarah singkat terbentuknya Dinas Sosial Kabupaten Brebes.

2.2.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Brebes

1. Visi

Visi Dinas Sosial Kabupaten Brebes adalah “*Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Sosial Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Berkeadilan*”. Visi tersebut mengandung makna bahwa sebagai

dinas pelayanan di bidang sosial di Kabupaten Brebes mempunyai cita-cita menjadi dinas yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang sosial ketenagakerjaan dan transmigrasi menjadi betul-betul bisa diwujudkan.

2. Misi

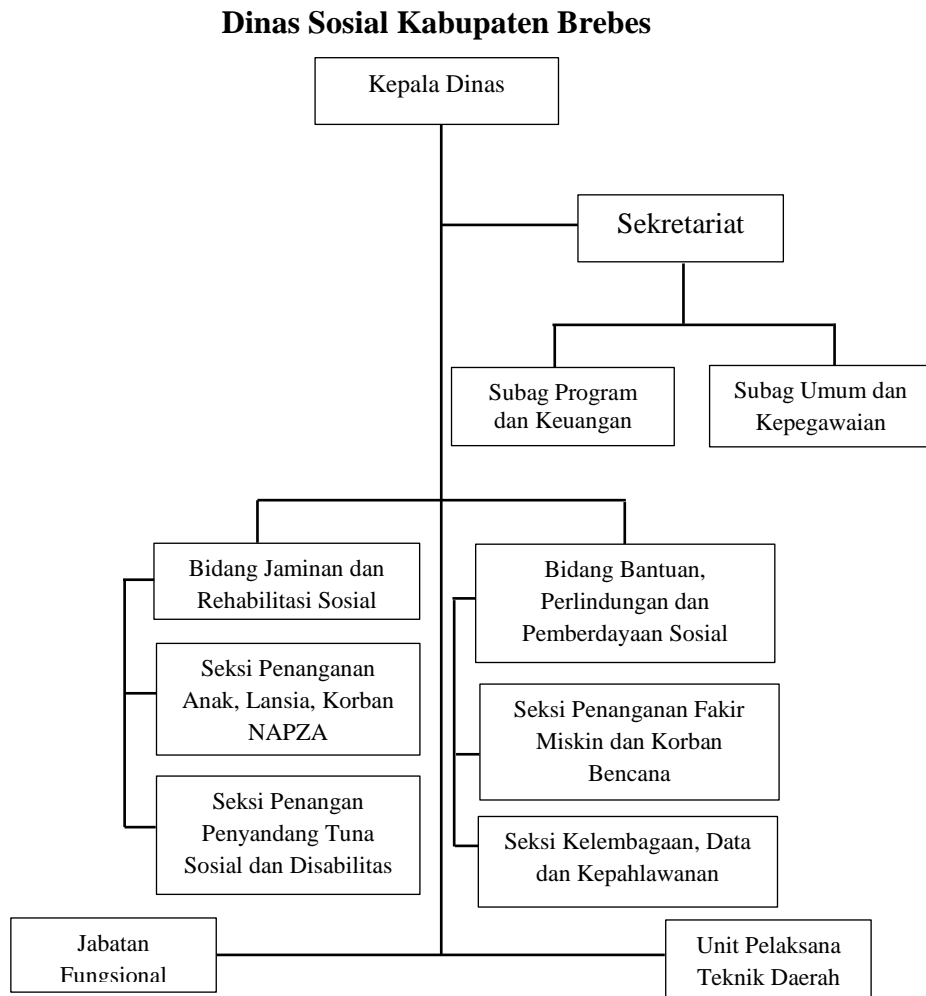
Untuk mencapai visi, maka disusunlah beberapa misi sebagai tindakan yang harus dilaksanakan tugas cita-cita tersebut dapat terwujud. Misi Dinas Sosial Kabupaten Brebes adalah:

- a. Mewujudkan pelayanan sosial yang berkualitas kepada masyarakat.
- b. Menumbuhkembangkan peran aktif masyarakat dalam penanganan sosial.
- c. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Brebes

Untuk meningkatkan kelancaran tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai struktur organisasi berikut:

Gambar 2.4 Bagan Struktur Organisasi



2.2.4 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes

Dinas Sosial Kabupaten Brebes mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan di bidang kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial, bantuan sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudkan diatas, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan menetapkan program kerja dinas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas.
- b. Merumuskan kebijakan di bidang jaminan dan rehabilitasi sosial dan bantuan, perlindungan dan pemberdayaan sosial sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- c. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang jaminan rehabilitasi sosial dan bantuan, perlindungan dan pemberdayaan sosial dan bantuan, perlindungan sosial dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan.
- d. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis.
- e. Menyelenggarakan kebijakan di bidang jaminan dan rehabilitasi sosial dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan.
- f. Menyelenggarakan kebijakan di bidang bantuan, perlindungan dan pemberdayaan sosial dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan.
- g. Mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum serta kepegawaian.

- h. Mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPT dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
- i. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja.
- j. Menyampaikan saran dan masukan kepada pemimpin untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Kabupaten Brebes sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang masing-masing jabatan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Brebes terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes
- b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian, dan ketatalaksanaan, pembinaan

ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Sekretariat dibantu oleh:

1. Subbagian Program dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Jaminan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Jaminan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dalam bidang jaminan dan rehabilitasi sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Jaminan dan Rehabilitasi Sosial dibantu oleh:

1. Seksi Penanganan Anak, Lanjut Usia dan Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
2. Seksi Penanganan Penyandang Tuna Sosial dan Disabilitas.

d. Bidang Bantuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

Bidang Bantuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang bantuan, perlindungan dan pemberdayaan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Bantuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial dibantu oleh:

1. Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Korban Bencana;

2. Seksi Kelembagaan Data dan Kepahlawanan.

e. UPT

UPT berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala Dinas Sosial.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.3. Profil Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

2.3.1. Sejarah Desa Grinting

Sejarah terbentuknya Desa Grinting terbagi dalam tiga periode, sebagaimana akan dijelaskan dibawah ini:

1. Periode I

Menurut Mbah Wangsa, Desa Grinting berasal dari kata daun kering (*garing*) yang bisa digulung (*dilinting*), karena banyaknya masyarakat yang menggunakan daun pisang dan daun jagung sebagai sarana untuk merokok, selain itu dipergunakan sebagai salah satu bahan yang diperdagangkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁴

Masyarakat Grinting pada saat itu hidup dari pertanian dan sebagian besar masyarakat Desa Grinting berprofesi sebagai nelayan, dimana banyak nelayan yang sudah melakukan perdagangan antar daerah bahkan melakukan perdagangan sampai keluar Pulau Jawa meskipun masih menggunakan peralatan (perahu) yang sangat

⁴ Anonim. Dokumentasi Desa. *Sekilas Sejarah Desa Grinting*. 4. Tidak dipublikasikan.

sederhana. Keadaan alampun masih dipenuhi dengan hutan dan rawa-rawa.

Peradaban masyarakat pada masa itu masih sangat sederhana bahkan cenderung primitif, salah satunya pada kondisi sosial budayanya. Jumlah penduduk pada masa itu pun relatif masih sedikit, sehingga masyarakat mudah untuk mempertahankan nilai-nilai kerukunan dengan segala keterbatasannya. Sedangkan nilai-nilai keyakinan yang dianut pada waktu itu masih bersifat animisme dan dinamisme.⁵ Oleh karena itu, dalam tatanan sosial masyarakatnya masih menggunakan adat-istiadat lama, di mana masyarakat masih menggunakan tata upacara ritual dengan sesajian dan *ubo rampe*⁶ lainnya guna melancarkan hajat masyarakat. Terutama yang menyangkut keselamatan bersama, baik yang masih hidup mapupun arwah para leluhur agar diberi kebahagiaan di alam kelanggengan.⁷

Komunitas masyarakat pada masa itu sudah mengangkat seorang sesepuh (tetua/pemimpin) desa (*pedukuhan*) yang dikenal dengan nama Mbah Wangsa. Mbah Wangsa dikenal sebagai orang yang

⁵ Kata animisme berasal dari bahasa latin, yaitu anima yang berarti 'roh'. Kepercayaan animisme adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh. Keyakinan ini banyak dianut oleh bangsa-bangsa yang belum bersentuhan dengan agama wahyu. Paham animisme mempercayai bahwa setiap benda di bumi ini (seperti laut, gunung, hutan, gua, atau tempat-tempat tertentu), mempunyai jiwa yang mesti dihormati agar jiwa tersebut tidak mengganggu manusia, atau bahkan membantu mereka dalam kehidupan ini. Sedangkan kata dinamisme berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *dunamos*, dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan arti kekuatan, daya atau kekuasaan. Dinamisme disebut juga dengan *preanisme*, yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda atau makhluk mempunyai daya dan kekuatan. (sumber: <http://pengertiandefinisi-arti.blogspot.com/2012/03/pengertian-animisme.html>.)

⁶ Ubo rampe adalah segala sesuatu yang bisa melengkapi atau mengiringi pada adat sesajen jawa, biasanya seperti kemenyan, kue ketan, kerupuk, ingkung, rengginang, tumpeng panggang, rempeyek, kolak, serundeng, mie bihun, uang, gubahan, lalaban, bubur baro-baro, dan jajanan pasar lainnya.

⁷ Anonim. Dokumentasi Desa. *Sekilas Sejarah Desa Grinting*. 4. Tidak dipublikasikan.

mempunyai banyak kelebihan (*linuwih*) dibandingkan dengan kebanyakan orang-orang lainnya pada waktu itu. Mbah Wangsa inilah leluhur pertama desa yang waktu itu menempati sebuah rumah kecil yang terbuat dari bambu, beratap daun kelapa, dan alas tidurnya menggunakan kulit harimau, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan Mbah Loreng atau Mbah Belang.⁸

Mbah Loreng menempati sebuah *perdikan* (tanah) kecil di tengah desa yang sekarang dikenal dengan sebutan "Sumur Tantu Wetan (Timur)". Sumur itu dulu dipakai sebagai sarana kebutuhan air yang sangat fitil, karena atas kehendak Tuhan dan kesaktian Mbah Wangsa sumur itu tidak pernah kering walau musim kemarau sekalipun. Walaupun sumur tersebut hanya dibuat dari tumpukan kayu sebagai penahan guguran tanah, sehingga masyarakat tiap hari datang untuk mengambil air guna keperluan sehari-hari. Karena sumur itu sering diambil airnya untuk wantu (mengisi tempat air) maka disebut "sumur wantu", yang akhirnya masyarakat Grinting sering menyebutnya dengan sumur "tantu". Mbah Wangsa mempunyai beberapa ilmu dan murid-murid yang nantinya ada beberapa murid darinya yang kemudian menjadi tetua di desa Grinting.

Sepeninggalan beliau tetua desa diteruskan oleh putra keduanya yang bernama Karta (Sukma Jati) karena anak pertamanya perempuan yang bernama Sulih dipersunting seorang jejaka dari Tanjung, maka

⁸ *Ibid.*

kemudian berdomisili di wilayah Tanjung yang sekarang. Sukma jati kemudian melakukan pembenahan-pembenahan desa, di antaranya persawahan, irigasi, sampai pada penataan jalan-jalan desa walaupun masih sederhana.

Pada masa desa Grinting ditetui oleh Sukma Jati, kehidupan masyarakat desa sudah mulai mengenal tata kehidupan yang mulai karena didukung oleh kesadaran masyarakatnya yang mudah diatur dan senang dengan kebersamaan di dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di desa. Sukma jati adalah salah satu orang yang gemar prihatin, bahkan sebagian hidupnya dipakai untuk menolong sesama sehingga beliau mendapat julukan Sukma Jati (mempunyai jiwa yang teguh).

Sukma Jati masih menempati rumah Mbah Wangsa (orang tuanya), bahkan memperbaiki dan membuat pagar sumur tantu peninggalan Mbah Wangsa, serta memelihara peninggalan-peninggalan Mbah Wangsa. Sukma Jati beristri seorang gadis yang masih merupakan sepupunya sendiri bernama Nyai Sadimen, dan berputra satu orang bernama Jaka Wegig, yang kemudian merantau ke tanah pasundan (tepatnya di daerah Sumedang dan kemudian mendirikan padepokan sampai akhir hayatnya, dan dikebumikan di daerah tersebut). Sukma Jati meninggal pada usia 89 tahun, dimakamkan di samping makam Mbah Wangsa di makam selatan.

Pengembangan dan jasa-jasa Sukma Jati yang pernah dilakukan pada masa hidupnya yaitu:

- a. Perluasan makam selatan.
- b. Melebarkan saluran irigasi di tengah-tengah desa dari selatan ke utara.
- c. Membuat padepokan yang memberi pelajaran batin (dulu bertempat di sebelah timur masuk Desa Grinting yang sekarang).
- d. Menyatukan kerukunan antar Desa Grinting dengan desa sekitarnya, di mana pada masa itu banyak sekali terjadi perkelahian, dan tindak kekerasan lainnya.
- e. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- f. Mengelola tatanan hidup masyarakat desa.

Perkembangan wilayah desa Grinting makin lama makin ke utara karena proses alam, yaitu terjadinya pengendapan lumpur dan pasir dari laut jawa yang akhirnya perluasan tanah sebelah utara desa dimanfaatkan untuk kegiatan nelayan maupun dipakai sebagai rumah-rumah hunian. Sepeninggalan Sukma Jati, yang menjadi tetua desa adalah Mbah Sangkan (nama julukan), karena Mbah Sangkan baru berada di desa Grinting setelah tua, sedangkan masa anak-anak dan remajanya berada di desa Ketanggungan yang sekarang. Padahal Mbah Sangkan masih merupakan keponakan dari Mbah Wangsa (anak dari adik Mbah Wangsa). Sangkan bisa berarti tidak diketahui asal usulnya, yang tidak dikira atau diperhitungkan. Mbah Sangkan sangat dikenal

masyarakat Grinting waktu itu karena ahli olah kanuragan (bela diri), ahli pengobatan bahkan dipercaya sebagai orang linuwih yang tan tedas tapak paluning pande, sehingga masyarakat Grinting mempercayakannya sebagai tetua desa.

Mbah Sangkan menempati rumah (*gubug*) di sebelah barat desa di tepi sungai Kluwut yang sekarang, membuka padepokan bela diri sambil mengatur para nelayan. Mbah Sangkan mempunyai seorang istri yang bernama Witri dan dikaruniai dua orang putra. Yang bernama Wagam dan Parni. Mbah Sangkan meninggal di usia 76 tahun, dan dimakamkan di makam selatan. Dan mendapat julukan Mbah *jenggot* (karena memelihara jenggot sampai panjang). Jasa-jasa Mbah Sangkan diantaranya:

- a. Menata desa menjadi wilayah-wilayah yang dipisahkan dengan jalan-jalan desa.
- b. Tempat hunian pertanian dipisahkan.
- c. Keamanan desa yang terjaga baik.

Pada masa itu perkembangan agama Islam sudah mulai masuk ke wilayah Grinting, sehingga di masyarakat mulai muncul perselisihan ideologi yang menjadikan masyarakat terpecah menjadi dua kelompok, yaitu masyarakat yang pro dan masyarakat yang kontra terhadap kedatangan Islam. Perkembangan Islam pada saat itu banyak sekali mempengaruhi terhadap tatanan bersosial dalam masyarakat, di mana ada sebagian masyarakat yang memeluk Islam sehingga nilai-nilai

tradisi atau adat istiadat mulai ditinggalkan (walaupun belum sepenuhnya). Dan ada juga sebagian masyarakat yang mencampur antara ajaran Islam dengan adat istiadat, namun ada sebagian masyarakat yang masih berpegang teguh pada tradisi.

2. Periode II

Pada masa ini, dilihat dari kondisi makro politik pemerintahan memang sedang terjadi konflik internal antara Prabu Siliwangi dengan Kesepuhan Cirebon, baik berupa konflik kewilayahan maupun keagamaan. Prabu Siliwangi masih kokoh pendiriannya bahwa wilayah Cirebon adalah salah satu wilayah yang masih termasuk wilayah Pasundan, sehingga apapun yang menjadi kebijakan Pasundan harus dituruti Cirebon. Namun pada kenyataannya karena Cirebon sudah masuk menjadi pemeluk Islam, Cirebon tidak mahu lagi takluk di bawah kekuasaan Pasundan yang masih memeluk Hindu Budha bahkan Animisme Dinamisme. Dari konflik inilah berdampak pada wilayah-wilayah sekitarnya termasuk desa Grinting yang pada waktu itu masyarakatnya banyak bergaul dan berbaur dengan masyarakat Cirebon. Karena pada masa ini pemerintahan Brebes belum terbentuk. Pemerintahan Brebes baru terbentuk setelah kesunanan Surakarta Hadiningrat di Solo diperintah oleh Sunan Pakubuwono II.

Kondisi ini menyebabkan desa Grinting tidak ada tetuanya lagi yang akhirnya menyebabkan masyarakat cenderung bertindak dan berbuat sendiri-sendiri. Dalam situasi yang demikian datanglah seorang

pengembara dari wilayah kulon (barat, dalam hal ini yang dimaksud adalah wilayah Ciebon) dengan diiringi rombongannya memasuki wilayah Grinting. Pengembara tersebut memperkenalkan diri dengan nama Suryaningrat. Berasal dari wilayah Cirebon dan masih kerabat kesepuhan Cirebon. Suryaningrat mengembara hingga masuk kewilayah Grinting karena menghindari konflik internal di dalam keratonnya. Sedangkan rombongan yang mengiringi Suryaningrat yaitu permaisuri atau istri Suryaningrat yang bernama Wulan Sari, penghulu keraton yang bernama Kyai Teja, adik laki-laki Suryaningrat yang bernama Tunggul. Kedatangan rombongan Suryaningrat ini sangat menggembirakan warga Grinting, karena disamping berdarah ningrat, rombongan ini juga selalu menunjukkan sikap yang lemah lembut dan pandai bergaul di masyarakatnya.

Dalam perkembangannya, Suryaningrat akhirnya diangkat menjadi tetua di desa Grinting. Dan karena sebab penyamarannya takut diketahui pihak Pasundan maupun Kesepuhan Cirebon, maka segala atribut keningratannya beserta bekal perjalanannya dikuburkan.

Suryaningrat mempunyai seorang putra yang kemudian dikenal dengan sebutan Kyai Ja'far Sidiq. Masa kepemimpinan Suryaningrat inilah pertanian dan perdagangan di desa Grinting maju dengan pesat. Bahkan pernah dibangun sebuah dermaga yang diberi nama “ *Tuk Malaya* “. Dengan perekonomian yang semakin maju inilah nama Grinting dikenal sampai ke daerah-daerah lainnya, yang akhirnya

semakin ramai pelabuhan di desa Grinting dan banyak perahu-perahu dari daerah lain singgah untuk berdagang. Nama Suryaningratpun semakin dikenal bahkan hubungan sosial ekonomi dengan Cirebon semakin baik, yang kemudian merubah tata kehidupan masyarakat Grinting yang dulu banyak menekuni pertanian berangsur-angsur berubah ke dunia perdagangan. Suryaningrat meninggal di usia 92 tahun dan dimakamkan di makam selatan. Sepeninggalan Suryaningrat desa Grinting ditetui oleh putranya yaitu Kyai Ja'far Sidiq. Kyai Ja'far Sidiq beristrikan cucu dari Mbah Jenggot bernama Nyai Gandrik, Kyai Jafar Sidiq maupun Nyai Gandrik yang sama-sama beragama Islam sangat tekun dan bersemangat di dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Grinting, bahkan beliau inilah orang Grinting yang pertama-tama menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Walaupun beliau berdua memeluk agama Islam yang tekun, tetapi tetap memelihara semua warisan leluhur baik yang berupa adat istiadat, benda-benda pusaka, maupun tempat-tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat waktu itu. Tetapi karena jumlah penduduk desa Grinting yang berkembang sangat cepat, maka oleh Kyai Jafar Sidiq disarankan membuat tempat pemakaman baru di utara desa, termasuk membuat sumur baru untuk kebutuhan air tawar warga desa yang kemudian dikenal dengan "*sumur tantu lor (utara)*". Kyai Jafar Sidiq hanya mempunyai seorang putri yang bernama Roro Menur, dan Kyai Jafar Sidiq meninggal di usia 79 tahun, dimakamkan

di sebelah utara desa. Tujuh tahun kemudian Nyai Gandrik meninggal dan dimakamkan di samping makam Kyai Jafar Sidiq.

Sepeninggalan Kyai Ja'far Sidiq desa Grinting ditetui oleh anaknya Nyi Roro Menur. Pada waktu Grinting ditetui oleh Nyi Roro Menur, banyak hal-hal yang masih bisa dirasakan sampai saat ini diantaranya penataan desa dan pengaturan pertanian, karena walaupun beliau perempuan namun cara kepemimpinannya sangatlah maju dan bijaksana. Nyi Roro Menur meninggal dunia diusia 81 tahun dan dimakamkan dimakam selatan.

Pada masa inilah wilayah Brebes masuk dalam wilayah keraton Surakarta Hadiningrat, di mana Brebes diperintah oleh Tumenggung Puspongoro. Hubungan masyarakat timur (Brebes) dengan warga Grinting sudah lama baik, walaupun secara geografis Grinting belum masuk kedalam wilayah Brebes. Tetapi dalam hal-hal tertentu banyak warga Grinting yang sudah mengikuti tata cara warga timur (Brebes), diantaranya mengikuti tata cara pemerintahan. Di mana perangkat desa sudah terbentuk dengan baik, seperti mengikuti tata cara keraton, adat istiadat mulai berkembang, dan masyarakat mulai mengenal aturan-aturan baku yang tertulis. Pada akhir masa pemerintahan Tumenggung Puspongoro inilah wilayah Grinting mulai dibakukan dengan batas-batas desa yang jelas dan dimasukkan dalam wilayah Brebes.

3. Periode III

Pada masa periode ini, sebetulnya desa Grinting sudah bisa dikatakan sebagai masyarakat yang sudah maju dari sisi kehidupan masyarakatnya, baik yang berupa perekonomian, sosial maupun tata pemerintahan. Karena pada masa ini keterkaitan desa Grinting dengan pemerintah Brebes sudah terbentuk, dan secara pemerintahan di desa Grinting sudah di tunjuk ketua desa yang bernama Ki Jubang (walaupun belum menggunakan pemilihan) pada tanggal 15 Maret 1773. Sehingga mulai tanggal itulah secara resmi masuk dalam wilayah Kabupaten Brebes.

Ki Jubang sendiri adalah anak dari Nyai Roro Menur yang ke 3, yang kemudian dituakan sebagai kepala desa. Dan penunjukan ini didasarkan kepada sikap dan perilaku Ki Jubang yang dianggapnya mempunyai kelebihan-kelebihan di banding masyarakat pada umumnya, baik secara perilakunya yang terpuji maupun sifat-sifat linuwih lainnya. Masa di mana desa Grinting di pegang oleh Ki Jubang inilah desa Grinting semakin bertambah maju, karena salah satu kebijakan Ki Jubang adalah terbuka terhadap masyarakat lainnya, yang akhirnya banyak masyarakat di luar desa Grinting yang bergaul dengan masyarakat Grinting, termasuk seringkali desa Grinting di kunjungi oleh rombongan dari para penguasa Brebes waktu itu (para sinuwun dan keluarganya, baik untuk berburu maupun sekedar rekreasi).

Sehingga banyak tempat-tempat di desa Grinting yang namanya di sesuaikan dengan petilasan-petilasan para sinuwun tersebut, di

antaranya dulu di desa Grinting sebelah barat di jadikan tempat memandikan kudakuda para sinuwun (padusan). Sungai kecil di sebelah barat dera, dulu banyak di pakai sebagai tempat untuk istirahat dan menyimpan barangbarang bawaan para sinuwun sehingga tempat sepanjang sungai itu dulu dipagari oleh do'a-do'a yang masih berpengaruh sampai sekarang, (do'a untuk menghindari dari gangguan para *bromocorah* (hantu dalam istilah lokal)). Ki Jubang meninggal pada usia 84 tahun dan dimakamkan di makam selatan, dan meninggalkan 4 orang putra dan 2 orang putri. Sepeninggalbeliau, hampir semua tetua desa di desa Grinting dipegang oleh keturunan-keturunan dari tokoh-tokoh tersebut di atas.

2.3.2. Letak Geografis dan Kondisi Demografi Desa Grinting

1. Letak Geografis

Desa Grinting termasuk salah satu desa dari sembilan belas desa yang ada di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Adapun batas-batas Desa Grinting adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara dibatasi Laut Jawa.
- Sebelah selatan dibatasi Jalan Raya Pantura.
- Sebelah barat dibatasi Desa Kluwut/Krakahan.
- Sebelah timur dibatasi Desa Pulogading.

Adapun Desa Grinting berada pada ketinggian 1 mdpl. Luas yang dimiliki Desa Grinting yaitu ±1.475,981 ha, yang terdiri dari tanah

pekarangan, persawahan, tambak, dan sarana dan prasarana umum lainnya.

Luas tersebut terinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.3

Luas Wilayah Desa Grinting⁹

No.	Kasifikasi Penggunaan Tanah	Luas Tanah
1.	Tanah pekarangan	± 277,050 ha.
2.	Tanah persawahan	± 487,650 ha.
3.	Tanah tambak	± 709,121 ha.
4.	Sarana dan prasarana umum	± 2,160 ha.

Akses menuju Desa Grinting terbilang mudah, karena letak desa yang berbatasan langsung jalan pantura. Sehingga memudahkan aktifitas warga Desa Grinting menuju pusat pemerintahan dan perekonomian yang berada di Kabupaten Brebes yang dapat ditempuh selama 20 menit dengan kendaraan bermotor. Selain itu letaknya cukup strategis karena berdekatan dengan wilayah industri.

2. Kondisi Demografi

Berdasarkan data Desa Grinting pada bulan Agustus 2015, jumlah penduduk Desa Grinting tercatat sebanyak 17.625, yang terdiri dari 9.189 penduduk laki-laki dan 8.436 penduduk perempuan. Adapun jumlah kepala keluarga sebanyak 5.556 jiwa yang terbagi ke dalam 05 RW dan 57 RT. Berikut tabel jumlah penduduk Desa Grinting:

⁹ Arsip Pemerintah Desa Grinting

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Desa Grinting Bulan Agustus 2014¹⁰

Penduduk	Laki-laki	Perempuan
Jumlah	9.189 jiwa	8.436 jiwa
Jumlah total	17.625 jiwa	

Laju Petumbuhan penduduk di Desa Grinting berjalan cepat. Hal ini ditandai dengan angka kelahiran yang tinggi, sehingga kelompok bayi dan balita adalah jumlah terbesar dari total penduduk Desa Grinting. Hal ini dikarenakan kurang berhasilnya program Keluarga Berencana dari pemerintah setempat. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini disajikan tabel jumlah penduduk Desa Grinting yang diksifikasikan berdasarkan umur.

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk Desa Grinting Berdasarkan Umur Bulan

Agustus 2014¹¹

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	1.045	958	1.995
2.	5-9	869	795	1.664
3.	10-14	886	780	1.661
4.	15-19	937	759	1.696
5.	20-24	837	786	1.617

¹⁰ Laporan momografi Desa Grinting Kec. Bulakamba, Kab. Brebes pada bulan Agustus 2014

¹¹ Arsip Pemerintah Desa Grinting

6.	25-29	947	921	1.868
7.	30-34	767	622	1.389
8.	35-39	1.519	558	1.177
9.	40-44	1.481	525	1.091
10.	45-49	1.440	569	1.107
11.	50-54	1.401	460	970
12.	55-60	466	476	939
13.	> 60	194	194	388
Jumlah		9.189	8.436	17.625

Di sisi lain, tingkat pendidikan masyarakat Desa Grinting tercatat cukup tinggi. Tidak sedikit yang mampu menyelesaikan pendidikan sampai jenjang sarjana atau diploma. Namun tidak dapat disangkal, bahwa hingga bulan Agustus 2015, sebagian besar penduduk Desa Grinting hanya menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD), bahkan tidak sedikit yang tidak tamat SD. Berikut gambaran secara detail yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.6

Data Pendidikan Penduduk Desa Grinting Bulan Agustus 2014¹²

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat Sarjana	38
2.	Tamat Diploma	151

¹² Arsip Pemerintah Desa Grinting Bulan Agustus 2014.

3.	Tamat SLTA	880
4.	Tamat SLTP	1.900
5.	Tamat SD	6.738
6.	Tidak Tamat SD	2.738
7.	Belum Tamat SD	5.796

2.3.3. Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi

1. Kondisi Sosial dan Budaya

Desa grinting memiliki kehidupan sosial dan budaya yang cukup kental, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antara masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya masih merupakan warisan nilai budaya. Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga warisan leluhurnya. Hal ini dapat terlihat dalam setiap upacara-upacara adat yang masih berlangsung secara terus-menerus dari generasi ke generasi berikutnya.

2. Kondisi Ekonomi

Perekonomian masyarakat Desa Grinting banyak ditunjang dari sektor pertanian. Hal ini disebabkan memang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Disamping itu, tidak sedikit masyarakat berprofesi sebagai pengrajin telur asin yang bertujuan memenuhi kebutuhan dalam desa sendiri atau dijual ke pusat perekonomian sekitar Kecamatan Brebes. Sedangkan profesi sebagai

petani tambak, nelayan, buruh pabrik, buruh proyek, penyedia jasa juga banyak digeluti. Bahkan banyak masyarakat yang mempunyai profesi ganda tergantung pada tuntutan musim dan tersedianya modal. Gambaran tersebut menunjukkan betapa bervariasinya mata pencaharian maupun profesi yang digeluti oleh masyarakat dalam usaha memnuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup. Adapun rincian jenis mata pencaharian masyarakat Desa Grinting pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Grinting¹³

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani/peternak	2.340
2.	Buruh tani	4.390
3.	Nelayan	230
4.	Pengusaha	338
5.	Buruh pabrik	648
6.	Buruh bangunan	421
7.	Pedagang	309
8.	Sopir/kondektur angkutan umum	231
9.	Pegawai negeri	216
10.	Tentara/polisi	4
11.	Jasa-jasa	365
12.	Pekerja warteg (Warung Tegal)	450

¹³ Arsip Demografi Pemerintahan Desa Grinting. Bulan Agustus 2014.

13.	Pekerja TKI	192
-----	-------------	-----

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Grinting tergolong pada taraf menengah ke bawah, seperti pada rincian tabel di atas, dimana sebagian besar penduduk Desa Grinting berprofesi sebagai buruh tani. Praktek yang dilakukan oleh masyarkat Desa Grinting dalam hal bertani ini adalah bagi hasil dalam pertanian, yaitu perjanjian kerjasama antara pemilik tanah dengan petani penggarap (buruh tani).

Sebagian wanita di Desa Grinting mempunyai pekerjaan sebagai buruh serabutan, dalam hal ini biasanya berupa pekerjaan membrondol bawang merah. Hal ini dapat dipahami karena Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten yang paling banyak menghasilkan bawang merah. Pekerjaan serabutan ini biasa dibayar perkilonya Rp. 500 dengan rata-rata upah yang diberikan adalah Rp. 15.000 untuk sehari bekerja selama 7-8 jam.¹⁴ Dengan demikian, bahwa kaum wanita di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, tidak hanya melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga melainkan merangkap pekerjaan lainnya di luar kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga.

Akhir-akhir ini laju perkembangan ekonomi di Desa Grinting sedikit demi ssedikit mengalami kemajuan. Indikatornya adalah adanya pasar pagi. Pasar tersebut mempunyai dampak positif bagi tingkat pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang dan memunculkan banyak

¹⁴ Hasil wawancara dengan ibu Laela, seorang ibu rumah tangga yang bekerja sampingan dengan membrondol bawang merah. Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019.

pedagang baru. Pasar ini juga semakin memudahkan masyarakat yang berbelanja, mereka tidak perlu sampai ke pasar kecamatan yang berjarak 5 km dari Desa Grinting.

Disamping itu, sebagian besar penduduk Desa Grinting juga merantau ke kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Para penduduk yang merantau berharap dapat memperbaiki perekonomian mereka. Profesi apapun mereka jalani demi bertahan hidup di kota metropolitan. Sehingga seringkali Desa Grinting terlihat sepi. Meskipun sebenarnya jumlah penduduk Desa Grinting tidaklah tergolong sedikit.